

Makalah Diskusi No. 15

Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan melalui Penghidupan Berkelanjutan

oleh Aditya Alta, Amalina Az Zahra & Azizah Nazzala Fauzi





Makalah Diskusi No. 15
Membantu Petani Keluar dari Perangkap Kemiskinan
melalui Penghidupan Berkelanjutan

Penulis:

Aditya Alta, Amalina Az Zahra & Azizah Nazzala Fauzi
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia
Agustus, 2023

Ucapan Terima Kasih:



Makalah ini berhasil dibuat berkat dukungan dari John Templeton Foundation, yang menghargai independensi analisis CIPS.

Sampul:

unsplash/Muhammad Azzam

DAFTAR ISI

Glosarium.....	7
Ringkasan Eksekutif.....	9
Gambaran Umum Kesejahteraan Petani di Indonesia.....	10
Kebijakan-Kebijakan dan Program-Program untuk Melindungi Kesejahteraan Petani.....	15
Kesejahteraan sebagai Fungsi Produksi.....	16
Kesejahteraan sebagai Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	17
Kesejahteraan sebagai Penghidupan Berkelanjutan.....	19
Pendekatan Studi.....	21
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
Penghidupan, Tantangan, dan Aset.....	24
Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani.....	27
Peran Kebijakan dan Lembaga.....	29
Bantuan Input, Alat, dan Mesin.....	29
Fasilitas Pascapanen, Infrastruktur, dan Akses Pasar.....	30
Program-Program Bantuan Sosial.....	31
Revitalisasi Danau Rawa Pening.....	32
Kesimpulan.....	34
Referensi.....	37

Daftar Tabel

Tabel 1. Upah/Pendapatan Bulanan Berdasarkan Sektor, 2005, 2010, 2015, dan 2021 (Rp).....	12
Tabel 2. Kualitas Hidup di Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia.....	13
Tabel 3. Peraturan-Peraturan dan Program-Program Terkait Perlindungan Sosial.....	18
Tabel 4. Kerangka Kerja Penghidupan Berkelanjutan.....	34

Daftar Gambar

Gambar 1. Sumbangan PDB Pertanian vs. Tenaga Kerja Pertanian, 1990–2021.....	10
Gambar 2 – Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian di Negara-Negara Asia Timur Terpilih (Konstanta US\$ 2015).....	11

GLOSARIUM

AUTP:

Asuransi Usaha Tani Padi

Bappenas:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BLT:

Bantuan Langsung Tunai

BPNT:

Bantuan Pangan Non-Tunai

BUMDES:

Badan Usaha Milik Desa

DFID:

British Department for International Development

DTKS:

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

FAO:

Food and Agriculture Organization

FGD:

Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)

PDB:

Produk Domestik Bruto

JKN:

Jaminan Kesehatan Nasional

KBLI:

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KPI:

Kartu Indonesia Pintar

KIS:

Kartu Indonesia Sehat

KLUI:

Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia

Kementan:

Kementerian Pertanian

Kemenkeu:

Kementerian Keuangan

Kementerian PUPR:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Musrenbangdes:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NTP:

Nilai Tukar Petani

PEN:

Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PIP:

Program Indonesia Pintar

PKH:

Program Keluarga Harapan

UNDP:

United Nations Development Program

UPSUS:

Upaya Khusus

USDA:

United States Department of Agriculture

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia terus menurun, tetapi sektor ini masih menyediakan lapangan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia. Karena rendahnya produktivitas, kemiskinan menjadi persoalan sosial utama bagi para petani. Pertanian terkonsentrasi di daerah-daerah perdesaan sehingga petani juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dirasakan oleh mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Makalah ini mengambil “pendekatan penghidupan berkelanjutan” yang melihat capaian-capaian kesejahteraan sebagai hasil interaksi faktor-faktor kontekstual, sumber daya atau aset penghidupan, kebijakan dan lembaga, serta strategi penghidupan. Menggunakan pendekatan ini dalam studi kasus dua desa di Jawa Tengah, makalah ini menilai seberapa jauh kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi para pekerja pertanian di perdesaan.

Sederet kebijakan dan program yang berorientasi pada produksi, seperti subsidi input dan perlindungan pasar, adalah bentuk kebijakan dan program yang paling umum untuk menyokong kesejahteraan petani. Namun, bentuk kebijakan dan program yang demikian hanyalah bersifat sementara. Subsidi pertanian juga kebanyakan berfokus pada tanaman pangan, khususnya beras, sehingga mendistorsi pasar dengan menggalakkan produksi pangan. Penghapusan subsidi-subsidi tersebut dapat mendorong budi daya tanaman dagang bernilai tinggi demi membuka jalan menuju perbaikan kesejahteraan melalui diversifikasi (penganekaragaman). Bantuan alat dan mesin pertanian kebanyakan diberikan per desa atau kelompok tani. Hal ini berarti bahwa akses ke bantuan-bantuan tersebut dipengaruhi oleh status dan lembaga sosial.

Pemerintah menjalankan program-program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), BLT bersyarat, bantuan pangan, serta berbagai program pendidikan dan kesehatan. Meski efektif untuk memastikan keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, penargetan program-program ini perlu ditingkatkan, khususnya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama tidak diperbarui. Untuk memastikan bahwa bantuan pangan tidak menyingkirkan pedagang ritel lokal dari pasar, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbolehkan penerima bantuan program Sembako membeli makanan dari toko mana pun.

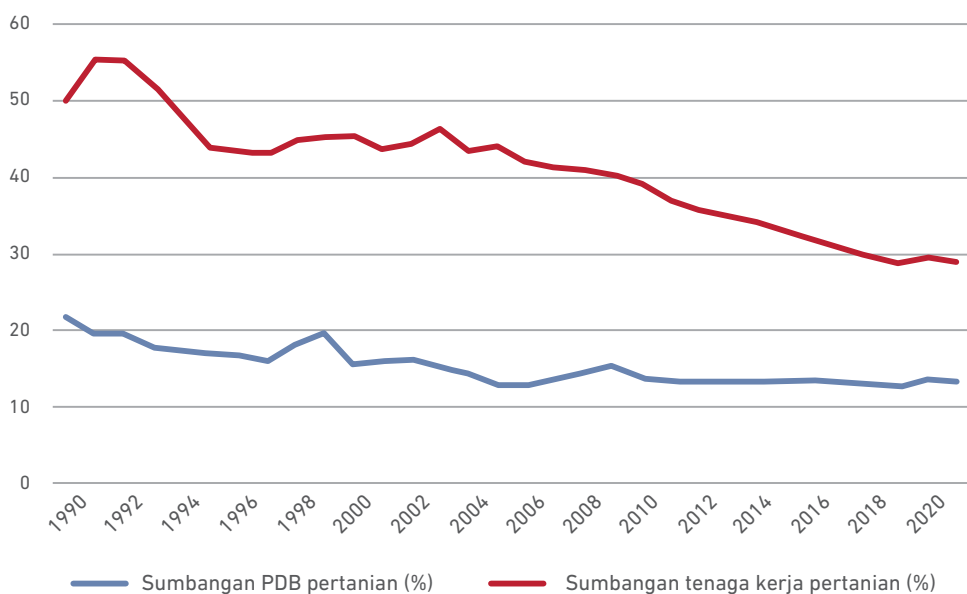
Pembangunan perdesaan juga perlu mempertimbangkan konteks geografis yang sifatnya sangat penting. Revitalisasi Danau Rawa Pening dilaporkan telah mengancam penghidupan rumah tangga petani. Guna meminimalkan dampak-dampak negatif serta memenuhi tujuan-tujuan ekonomi dan lingkungan, pembangunan bentang lahan (lanskap) harus mengakui berbagai fungsi yang dimainkan oleh bentang lahan dan diupayakan untuk mewujudkan koherensi kebijakan dan partisipasi masyarakat lokal yang efektif.

Terakhir, pemerintah seyogianya berhenti menggunakan indeks harga (seperti nilai tukar petani [NTP]) sebagai ukuran kesejahteraan petani. Indikator yang lebih baik dapat mempertimbangkan elemen-elemen penghidupan lokal dan pendapatan petani dari pekerjaan pertanian maupun nonpertanian.

GAMBARAN UMUM KESEJAHTERAAN PETANI DI INDONESIA

Kesejahteraan petani telah menjadi isu kebijakan utama seiring dengan kian menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Meski masih dapat dibidang cukup besar, sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 21,55% pada 1990 menjadi 13,28% pada 2021. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebagai proporsi dari keseluruhan tenaga kerja juga sangat berkurang—dari di atas 50% pada 1990 menjadi 28,99% pada 2021 (Gambar 1). Transformasi ekonomi dan mobilitas tenaga kerja menuju sektor industri dan jasa berimbas pada menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia.

Gambar 1.
Sumbangan PDB Pertanian vs. Tenaga Kerja Pertanian, 1990–2021

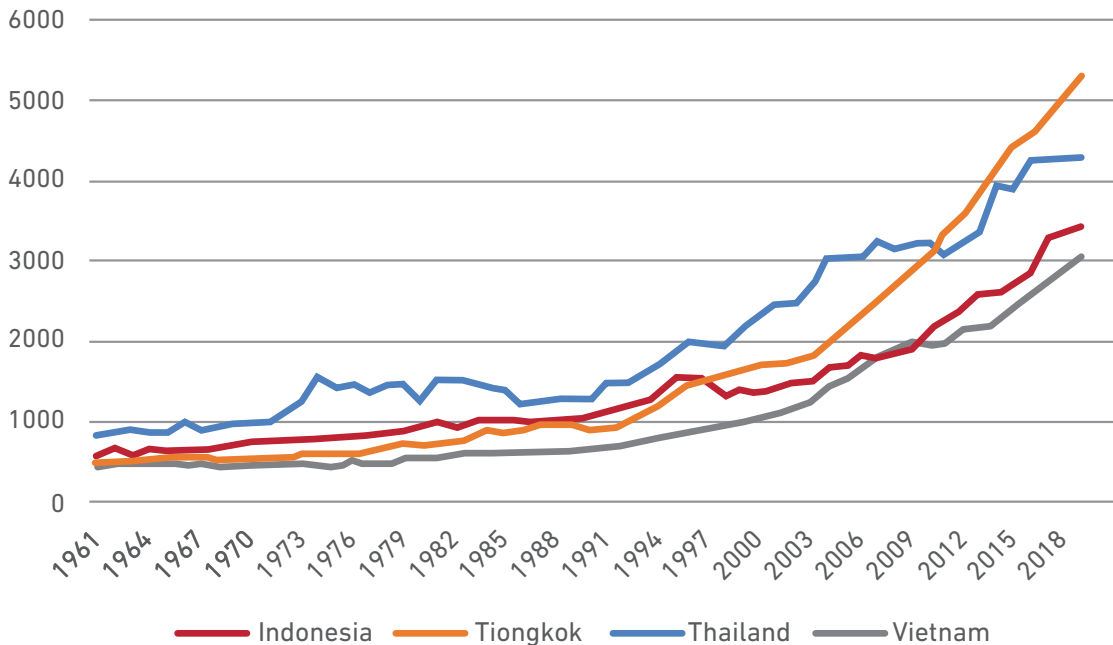


Sumber: Bank Dunia (2023a, 2023b)

Namun demikian, jumlah tenaga kerja yang hampir mencapai 30% dari jumlah keseluruhan tergolong cukup besar. Mereka memiliki output pertanian yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya dengan karakteristik agraria yang serupa. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia relatif rendah, yakni US\$ 3.419 per pekerja pada 2019, dibandingkan dengan US\$ 5.281 per pekerja di Tiongkok dan US\$ 4.274 per pekerja di Thailand. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2, produktivitas tenaga kerja pertanian Indonesia lebih tinggi daripada Vietnam, tetapi kesenjangannya makin kecil sejak awal 2000-an.

¹ Dihitung dengan membagi nilai bruto *output* pertanian dari tanaman, peternakan, dan budi daya pertanian dengan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian.

Gambar 2.
Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian di Negara-Negara Asia Timur Terpilih
(Konstanta US\$ 2015)



Sumber: diolah dari United States Department of Agriculture (USDA) (2022)

Dengan produktivitas yang relatif rendah, petani Indonesia mendapatkan upah dan pendapatan yang relatif rendah juga dari hasil kerja dan panen mereka. Tabel 1 menunjukkan bahwa pekerja di sektor pertanian² memperoleh upah bulanan terendah dalam dua dasawarsa terakhir. Pada 2015, rata-rata upah di sektor pertanian berada jauh di bawah 1 juta rupiah (sekitar US\$ 70) per bulan. Pada 2021, sektor ini pun masih menjadi sektor dengan upah terendah, bahkan ketika dibandingkan dengan lebih banyak sektor dalam klasifikasi industri 2015 yang baru.

Dengan produktivitas yang relatif rendah, petani Indonesia mendapatkan upah dan pendapatan yang relatif rendah juga dari hasil kerja dan panen mereka.

² Makalah ini menggunakan istilah "petani" dan "pekerja/buruh pertanian" dengan makna yang sama dan bergantian, dan umumnya mengacu pada individu dan rumah tangga yang bekerja secara keseluruhan atau sebagian dalam budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, atau peternakan. Untuk Tabel 1, BPS menggunakan "pekerja" untuk mengacu pada buruh, karyawan, atau pekerja lepas individu berdasarkan sektor utama kegiatannya masing-masing.

Tabel 1.
Upah/Pendapatan Bulanan Berdasarkan Sektor, 2005, 2010, 2015, dan 2021 (Rp)

Sektor (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia [KLUI] 1990)	2005	2010	2015	Sektor (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] 2015) ³	2021
Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	362.238	576.848	957.205	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.396.579
Pertambangan dan penggalian	1.383.364	1.937.720	2.977.571	Pertambangan dan penggalian	3.617.892
Industri pengolahan	719.767	1.089.733	1.676.874	Industri pengolahan	2.659.121
Listrik, gas, dan air	1.110.962	1.797.948	2.513.744	Pengadaan listrik dan gas	3.856.069
Bangunan	697.636	1.046.539	1.687.911	Construction	2.314.837
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	684.963	1.102.723	1.600.722	Perdagangan besar dan eceran; perawatan mobil dan sepeda motor	2.302.001
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	858.650	1.457.516	2.416.771	Angkutan dan pergudangan	2.882.243
Kuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, dan jasa perusahaan	1.275.804	2.045.636	2.893.631	Aktivitas keuangan dan asuransi	4.136.064
Jasa kemasyarakatan	932.545	1.505.703	2.172.793	<i>Real estates</i>	3.501.738
				Kegiatan usaha	3.101.440
				Penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman	1.929.174
				Informasi dan komunikasi	4.064.152
				Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah	2.418.008
				Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	3.906.484
				Pendidikan	2.630.733
				Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	3.309.831
				Jasa lainnya	1.517.244

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2007; 2012; 2017; 2021), diolah

³ Sejak 2018, sektor ketenagakerjaan dalam publikasi-publikasi BPS diklasifikasikan ke dalam 17 kategori yang merujuk pada KBLI 2015. Sebelumnya, sektor-sektor dimasukkan ke dalam sembilan kategori berdasarkan KLUI 1990.

Kemiskinan adalah isu kesejahteraan utama yang dihadapi oleh rumah tangga petani rakyat. Pada 2021, 51,33% rumah tangga miskin di Indonesia bergantung kepada pertanian sebagai sumber utama pendapatan mereka (BPS, 2021). Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization atau FAO) memperkirakan bahwa 73,10% rumah tangga pertanian di perdesaan adalah petani dengan skala usaha kecil, dan 60,30% tergolong miskin (Amanah *et al.*, 2021). FAO mendefinisikan rumah tangga usaha tani berskala kecil sebagai rumah tangga yang mengelola lahan pertanian maksimal sebesar median tertimbang luas minimum lahan pertanian pada tingkat nasional (FAO, 2017). Di Indonesia, median tertimbang luas lahan adalah 2 hektar, dengan kata lain, lahan pertanian dengan luas sama dengan atau kurang dari 2 hektar dikategorikan sebagai usaha tani berskala kecil.⁴ BPS (2018) juga melaporkan bahwa jumlah petani gurem⁵ pada 2018 naik hampir 11% dari 2013. Lahan-lahan kecil ini tidak dapat mencapai produktivitas tinggi melalui perekonomian skala (*economies of scale*). Dengan bertambahnya jumlah usaha tani berskala kecil, pertanian makin banyak dilakukan hanya untuk bertahan hidup dan para petani pun kian kesulitan untuk terentaskan dari kemiskinan.⁶

Kemiskinan adalah isu kesejahteraan utama yang dihadapi oleh rumah tangga petani rakyat.

Secara historis, kemiskinan pada petani di Indonesia diperparah oleh kegagalan modernisasi pertanian. Karena kurangnya mekanisasi pada sebagian besar sektor pertanian, surplus tenaga kerja dari sektor perekonomian lainnya diserap oleh sektor pertanian sehingga melanggengkan produktivitas per orang di sektor pertanian yang relatif rendah (Booth, 2000; Geertz, 1963).

Kemiskinan pada petani di Indonesia diperparah oleh kegagalan modernisasi pertanian.

Pada 2021, lebih dari separuh populasi yang bekerja di daerah-daerah perdesaan berkecimpung di sektor pertanian—dibandingkan hanya sepuluh persen di daerah-daerah perkotaan (BPS, 2021). Para petani dihadapkan dengan banyak tantangan sosial dan ekonomi yang berakar dari disparitas antardaerah (perdesaan vs. perkotaan), seperti keterbatasan akses ke infrastruktur dan layanan publik (Tabel 2).

Tabel 2.
Kualitas Hidup di Daerah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia

Indikator	Rural	Urban
Populasi miskin (2022, %) (BPS, 2022a)	12,29	7,50
Rasio ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) ⁷ (2022, % populasi usia kerja) (BPS, 2022f)	46,21	43,56
Angka kematian anak-anak di bawah lima tahun (balita) (2017, per 1.000 kelahiran hidup) (BPS, 2017a)	33	31

⁴ Perlu dicatat bahwa klasifikasi FAO didasarkan pada survei yang dilakukan pada 2000. Kita dapat memprediksi bahwa median yang sebenarnya saat ini lebih kecil karena lahan yang dikelola petani makin kecil.

⁵ Dalam statistik pertanian Indonesia, *petani gurem* didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengelola lahan seluas kurang dari 0,5 hektar.

⁶ Mengelola lahan yang kecil dapat menjadi strategi bagi rumah tangga petani kecil. Lahan yang kecil, atau pemecahan lahan besar menjadi bagian-bagian kecil, bisa jadi merupakan pilihan untuk meminimalkan risiko terkait pengelolaan lahan besar, seperti gagal panen, atau memungkinkan akses terhadap karakteristik lahan yang berbeda (jenis tanah, kesuburan, akses air, dll.) (Charlesworth 1983; Ilbery 1984; Sumaryanto & Purba, 2011).

⁷ Rasio ketergantungan mengukur jumlah penduduk nonproduktif (populasi berusia di atas 65 dan 0–14 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif (populasi berusia 15–64 tahun) yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ketergantungan 48,62 untuk populasi perdesaan dapat diartikan bahwa setiap 100 orang dengan usia produktif menanggung hampir 49 orang dengan usia nonproduktif.

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (2022, %) (BPS, 2022d)	76,99	83,80
Rumah tangga dengan akses air minum bersih (2022, %) (BPS, 2022d)	49,03	41,95
Akses fasilitas kesehatan dasar (2022, %) (BPS, 2022d)	75,37	82,22
Akses perumahan yang layak dan terjangkau (2022, %) (BPS, 2022b)	56,84	63,45
Populasi dengan pendidikan tinggi (2022, %) (BPS, 2022f)	55,48	73,91
Rata-rata upah bulanan (Februari 2023, Rp) (BPS, 2023)	1.985.275	3.040.475
Populasi dewasa dengan koneksi ke internet (2019, %) (Bank Dunia, 2021)	36	62
Konsumsi protein harian per kapita (2022, gram) (BPS, 2022c)	62,75	65,84
Asupan energi harian bayi berusia >36–59 bulan (2020, kilokalori [kcal]) (Lestari <i>et al.</i> , 2020)	1.266,94	1.369,11

“Tanpa pelatihan dan pendidikan, petani yang beralih dari sektor pertanian hanya akan berakhir di sektor informal tanpa perbaikan kesejahteraan yang signifikan.”

Dengan pendapatan dan kualitas hidup pada sektor pertanian yang lebih rendah di daerah-daerah perdesaan, para petani mulai meninggalkan sektor ini untuk bekerja di sektor lainnya. Namun, dampak kesejahteraan dari peralihan ke sektor nonpertanian juga berkurang. Sebuah studi longitudinal yang dilakukan oleh Moeis *et al.* (2020) menunjukkan bahwa peralihan dari sektor pertanian ke sektor lain secara signifikan mengurangi kemungkinan kemiskinan pada rumah tangga petani Indonesia sebelum 2007, tetapi tidak ditemukan perbaikan kesejahteraan yang signifikan pada mereka yang meninggalkan sektor pertanian setelah 2007. Perubahan ini kemungkinan dikarenakan mobilitas tenaga kerja ke sektor formal membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi dalam perekonomian Indonesia yang makin modern. Tanpa pelatihan dan pendidikan, petani yang beralih dari sektor pertanian hanya akan berakhir di sektor informal tanpa perbaikan kesejahteraan yang signifikan. Keterbelakangan di perdesaan sangatlah serupa dengan ketertinggalan. Masyarakat perdesaan tidak memperoleh keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan dalam peralihan perekonomian Indonesia sebagaimana jauh lebih mudah didapatkan di perkotaan.

Makalah ini mengkaji berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang—baik secara langsung maupun tidak—ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Berdasarkan pengamatan lapangan di dua desa di Jawa Tengah, makalah ini mengajukan konsepsi kesejahteraan sebagai kepemilikan kapasitas dan aset untuk penghidupan keberlanjutan dan menilai sejauh mana kebijakan dan program yang ada menyentuh isu kebijakan petani dengan pemahaman ini.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM UNTUK MELINDUNGI KESEJAHTERAAN PETANI

Pemerintah Indonesia acap kali merujuk kepada NTP sebagai indikator kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara dua indeks: indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani. Skor NTP lebih daripada 100 dapat diinterpretasikan sebagai indikator positif atas daya beli petani dan peningkatan kesejahteraan, sementara skor NTP kurang daripada 100 diinterpretasikan sebagai defisit. NTP pada Mei 2023 adalah 110,20—sedikit berkurang dari NTP pada April 2023, yaitu 110,58 (BPS, 2023).

Penggunaan indeks harga sebagai ukuran kesejahteraan petani telah banyak dikritik sebagai metode yang sesat dan tidak akurat. NTP dapat meningkat saat harga produk pertanian naik ketika terdapat keterbatasan pasokan, dan hal ini bisa jadi tidak mencerminkan peningkatan pada pendapatan petani. Petani juga memperoleh pendapatan tambahan dari harga komoditas pertanian per unit yang lebih tinggi ketika mereka mengelola lahan-lahan yang kecil (Ruslan, 2021).

Sederet kebijakan yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan di Indonesia bisa dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan pemahaman dan pendekatannya terhadap kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan tersebut menyentuh kesejahteraan petani dalam hal fungsi produksi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penghidupan berkelanjutan.

Kebijakan-kebijakan tersebut menyentuh kesejahteraan petani dalam hal fungsi produksi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penghidupan berkelanjutan.

Kesejahteraan sebagai Fungsi Produksi

Ketika kesejahteraan dianggap sebagai fungsi produksi, kesejahteraan petani dipahami meningkat seiring dengan naiknya produksi pertanian. Kebijakan-kebijakan yang mengasumsikan bahwa

Kebijakan-kebijakan yang mengasumsikan bahwa kesejahteraan meningkat seiring dengan kenaikan produksi bertujuan untuk mempertahankan harga yang lebih tinggi untuk produk pertanian dan harga yang lebih rendah untuk input guna mengerek produksi.

kesejahteraan meningkat seiring dengan kenaikan produksi bertujuan untuk mempertahankan harga yang lebih tinggi untuk produk pertanian dan harga yang lebih rendah untuk input guna mengerek produksi.

Pendekatan kebijakan ini dapat ditemukan pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) 2020–2024 dan Undang-Undang (UU) No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Renstra ini secara eksplisit menyatakan bahwa kesejahteraan petani merupakan hasil capaian berbagai program dan kegiatan terkait perkembangan pertanian (Kementan, 2020, hlm. 40). UU No. 19/2013⁸ menguraikan strategi perlindungan petani yang meliputi upaya-upaya untuk memastikan input pertanian (pupuk dan benih) yang stabil dan terjangkau melalui subsidi dan bantuan; mengadakan alat, mesin, pestisida, obat, dan pakan hewan; serta memastikan harga komoditas pertanian yang menguntungkan petani domestik melalui tarif bea masuk dan kontrol harga (Pasal 7, 19–21, 25).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa restriksi impor merugikan petani dan memperlebar ketimpangan melalui tingginya harga-harga komoditas (Amanta & Wibisono, 2021). Mengingat bahwa kurang lebih dua pertiga petani Indonesia adalah konsumen net beras (McCulloch, 2008; SMERU, 2015; Bank Dunia, 2016), dampak negatif akibat tingginya harga pangan terhadap pengeluaran petani lebih besar daripada kenaikan pendapatan mereka.

Subsidi dan input gratis (pupuk dan benih), apabila tersedia bagi petani, dapat membantu mengurangi biaya produksi serta mencapai hasil panen yang optimal. Petani padi sawah yang menerima bantuan pupuk memproduksi hasil panen di atas rata-rata dibandingkan mereka yang tidak (Ruslan, 2021). Namun, subsidi pupuk memiliki cakupan terbatas dan tidak menjamin akses yang berkelanjutan terhadap pupuk terjangkau. Jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan hanya memenuhi 37%–51% kebutuhan pupuk nasional yang dilaporkan sehingga petani tidak punya pilihan lain selain membeli pupuk nonsubsidi—dengan selisih harga yang besar karena adanya subsidi—atau mengurangi penggunaan pupuk dan memperoleh lebih sedikit hasil panen (Alta *et al.*, 2021). Jenis-jenis pupuk dan tanaman yang mendapatkan subsidi makin dibatasi akibat kenaikan harga pupuk secara global. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10/2022 membatasi cakupan program hanya pada urea dan NPK, serta petani yang menanam beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu skala kecil, kakao, dan kopi. Program ini dititikberatkan pada sektor tanaman pangan, khususnya beras, sehingga menciptakan distorsi pasar yang mendorong produksi pangan. Penghapusan subsidi-subsidi ini dapat mempromosikan budi daya tanaman dagang bernilai tinggi yang membuka jalan baru menuju perbaikan kesejahteraan melalui diversifikasi (Bank Dunia, 2023).

⁸ UU No. 19/2013 diamandemen oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diamandemen lagi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Amandemen tersebut mencabut ketentuan yang memprioritaskan produksi domestik untuk memenuhi permintaan pangan nasional dan mengakui bahwa pangan impor juga sama pentingnya dengan produk pangan domestik dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan.

Bantuan benih diberikan dalam bentuk benih bersubsidi atau gratis. Dari 2015–2018, program Upaya Khusus (atau UPSUS) dari Pemerintah Pusat menyediakan benih beras inbrida dan hibrida, jagung hibrida, dan kedelai berkualitas tinggi. Mandat UPSUS berakhir pada 2018, dan bantuan benih mulai diberikan dalam program yang berbeda-beda dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Meski diberikan selama bertahun-tahun, keberhasilannya relatif hanya terlihat pada jagung, dengan benih hibrida membentuk 80%–90% dari varietas yang dibudidayakan di Indonesia (Syahrudin *et al.*, 2020). Akan tetapi, adopsi benih jagung hibrida secara luas bisa jadi lebih didorong oleh industri benih komersial dibandingkan dari bantuan pemerintah.

Serupa dengan hal tersebut, program-program pemberian teknologi dan mesin gratis kerap bertumpang-tindih dengan program-program dari sektor swasta, tetapi program pemerintah kurang dibarengi dengan pelatihan pengguna dan pemeliharaan yang memadai sebagaimana lazimnya pada transfer teknologi oleh sektor swasta (Budiman & Alta, 2022).

Kesejahteraan sebagai Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pendekatan evaluasi kesejahteraan yang kedua ini melihat pemenuhan berbagai kebutuhan dasar (umumnya dipahami sebagai pemenuhan standar minimal gizi [asupan makanan dan air], kesehatan, pendidikan, rumah, sanitasi, dan layanan lainnya [Frances, 1985; Streeten *et al.*, 1981]) sebagai indikator kesejahteraan. Pendekatan ini umumnya digunakan oleh pemerintah atau lembaga pembangunan untuk menentukan garis kemiskinan dan dipakai juga oleh BPS untuk mendefinisikan kemiskinan serta mengukur tingkatnya (BPS, t.t.).

Pendekatan evaluasi kesejahteraan yang kedua ini melihat pemenuhan berbagai kebutuhan dasar sebagai indikator kesejahteraan.

Pemerintah telah melaksanakan serangkaian program perlindungan sosial demi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia berpendapatan rendah, termasuk bantuan pangan, dana tunai, pendidikan, dan layanan kesehatan. Program-program tersebut diamanatkan oleh UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tabel 3). Sejak 2012, cakupan perlindungan sosial telah meningkat secara signifikan—dari 5,3 juta menjadi 17,3 juta rumah tangga yang tergolong populasi *bottom* 40 (B40)⁹ pada 2017 (Bank Dunia, 2020).

Berbagai bantuan sosial pun diberikan pada periode 2020–2022 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2020. PEN meliputi beraneka ragam insentif dan stimulus keuangan yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), diskon tarif listrik, bantuan beras, program pelatihan bagi karyawan yang dirumahkan, dan alokasi keuangan untuk sektor kesehatan untuk pengadaan alat-alat guna menangani COVID-19 (Kementerian Keuangan [Kemenkeu], t.t.).

⁹Populasi B40 adalah rumah tangga dengan pendapatan 40% terbawah.

Tabel 3.
Peraturan-Peraturan dan Program-Program Terkait Perlindungan Sosial

Peraturan	Program Perlindungan Sosial	Deskripsi
Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1/2018 tentang Program Keluarga Harapan	Program Keluarga Harapan (PKH)	BLT bersyarat yang menasar masyarakat miskin dan rentan berdasarkan lokasi geografis, tingkat pendidikan, status ibu hamil, dan anggota keluarga dengan disabilitas hingga 15 juta rupiah per bulan (US\$ 1.000) per bulan.
Permensos No. 5/2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako	Program Sembako	Bantuan pangan yang ditujukan untuk menutupi kebutuhan konsumsi pangan ideal (karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin dan mineral) melalui pemberian bahan pangan yang beragam. Penerima mendapatkan bantuan tunai senilai Rp200.000 (US\$ 13) per rumah tangga per bulan yang hanya dapat dibelanjakan untuk bahan pangan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 10/2020 tentang Program Indonesia Pintar	Program Indonesia Pintar (PIP)	Bantuan pendidikan K-12 diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82/2018	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bantuan layanan kesehatan diberikan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk keluarga miskin dan rentan.
PP No. 43/2020 tentang Perubahan atas PP No. 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Diskon tarif listrik	Penggratisan atau pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada rumah tangga miskin dan rentan selama pandemi COVID-19 berdasarkan golongan daya listrik.
	Kartu Prakerja	Program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> dengan dukungan pendapatan bagi pekerja dari keluarga miskin dan rentan yang dirumahkan pada pandemi COVID-19.
	Kupon makanan	Bantuan pangan dalam bentuk bantuan langsung tunai hingga 2,4 juta rupiah per bulan untuk keluarga miskin dan rentan.
	Bantuan beras	Bantuan beras 10 kg bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi COVID-19, disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).
	BLT-Dana Desa	BLT untuk keluarga non-PKH, miskin, dan rentan oleh pemerintah kabupaten.
	Bantuan minyak goreng	BLT terbatas senilai Rp300.000 (US\$ 20) dari April–Juni 2022 untuk keluarga miskin dan rentan yang terdampak oleh tingginya harga minyak goreng secara global.

Akan tetapi, program-program ini memiliki sejumlah keterbatasan. Meski perlindungan sosial tertarget lebih baik dalam menyediakan jaring pengaman daripada subsidi dan restriksi impor, distribusi bantuan pemerintah masih tidak merata karena mereka yang paling membutuhkan justru tidak menerima manfaatnya (Patunru & Respatiadi, 2017). Pada paruh kedua 2021, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa pemerintah mengalami kerugian senilai hampir 7 triliun rupiah (sekitar 483 juta dolar Amerika Serikat) akibat kesalahan penyaluran bantuan PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai (BST) (Ombudsman, 2022). Di samping itu, program-program bantuan dan perlindungan sosial, bahkan dengan penargetan yang tepat dan daftar penerima yang mutakhir, tidak meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan karena hanya efektif melindungi keluarga rentan dari penurunan kesejahteraan secara sementara.

Kesejahteraan sebagai Penghidupan Berkelanjutan

Dua pendekatan sebelumnya berfokus pada capaian kesejahteraan. Pendekatan pertama mengasumsikan hasil panen, pendapatan, harga panen, dan indikator produksi pertanian lainnya sebagai capaian yang diinginkan bagi petani. Sementara itu, pendekatan kedua bertujuan mencapai tingkat minimum pemenuhan aspek-aspek kebutuhan dasar.

Dengan berfokus pada capaian-capaian yang mudah terukur, kebijakan cenderung mengabaikan faktor-faktor yang sifatnya lebih penting untuk memperbaiki kesejahteraan, seperti sumber daya (kapabilitas dan aset yang menjadi sarana penghidupan, seperti pendidikan, keterampilan, serta kepemilikan lahan dan ukuran lahan pertanian) dan strategi (aktivitas untuk memperoleh penghidupan, seperti tetap menjadi petani, menggabungkan berbagai sumber pendapatan, atau meninggalkan sektor pertanian) yang tersedia bagi petani, serta peran kebijakan, lembaga, dan faktor-faktor struktural (Chambers & Conway, 1992; Scoones, 2015).

Para pakar dan lembaga pembangunan internasional¹⁰ telah mengembangkan sebuah pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk mengarahkan penelitian dan kebijakan publik ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut (Carney *et al.*, 1999; Scoones, 1998). Chambers dan Conway (1992, hlm. 6), dalam sebuah kertas kerja yang dianggap berpengaruh dalam topik ini, mendefinisikan bahwa penghidupan terdiri atas “kapabilitas, aset (termasuk sumber daya material maupun sosial) dan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh penghidupan,” serta menyebut suatu penghidupan sebagai berkelanjutan “ketika penghidupan tersebut dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan, menjaga atau menambah kapabilitas dan asetnya, tetapi tidak mengancam basis sumber daya alamnya.”

Maka dari itu, pendekatan penghidupan berkelanjutan juga berkaitan dengan dampak transformatif kebijakan terhadap penghidupan. Dorward (2009) dan Mushongah (2009) membuat kategori-kategori penghidupan yang terdiri atas orang-orang yang “naik kelas” (mengumpulkan aset melalui ekspansi skala atau produktivitas kegiatan penghidupannya saat ini), “beralih” (menginvestasikan kembali aset ke kegiatan baru; mendiversifikasikan sumber pendapatan, termasuk pekerjaan di luar pertanian atau di lokasi baru), “bertahan” (menjaga tingkat kesejahteraan saat ini di tengah tantangan; kesulitan bertahan), dan “keluar” (kehilangan penghidupan inti dan keluar dari lahan pertaniannya, biasanya karena guncangan).

¹⁰ Seperti British Department for International Development (DFID), Oxfam, United Nations Development Program (UNDP).

Dengan demikian, pendekatan penghidupan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan capaian-capaian yang dapat diukur, tetapi juga berbagai strategi dan faktor eksternal yang memengaruhi perbaikan kesejahteraan.¹¹ Pendekatan ini mempertimbangkan pekerjaan nonpertanian yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh petani. Dalam latar perdesaan yang berubah-ubah, memiliki sumber penghidupan produktif yang beragam menjadi strategi penting karena kegiatan pertanian makin banyak berkaitan dengan kegiatan nonpertanian (Ellis, 2000; Haggblade et al., 2010).

“ Pendekatan penghidupan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan capaian-capaian yang dapat diukur, tetapi juga berbagai strategi dan faktor eksternal yang memengaruhi perbaikan kesejahteraan. ”

¹¹ Baru-baru ini, McCarthy *et al.* (2023) mempelajari trayektori penghidupan, atau arah dan pola penghidupan sebagai reaksi terhadap berbagai konteks, faktor eksternal, sumber daya, dan strategi, pada sistem produksi pertanian di Indonesia.

PENDEKATAN STUDI

Makalah ini menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk mengevaluasi berbagai strategi yang digunakan para petani untuk memperbaiki kesejahteraan mereka, serta peran kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi atau menghambat peningkatan kesejahteraan. Mengikuti Scoones (1998: 3), studi kasus ini didasarkan pada pertanyaan berikut: "Dalam suatu konteks tertentu..., kombinasi sumber daya penghidupan apa...yang menghasilkan kemampuan untuk mengikuti kombinasi strategi penghidupan...dengan capaian apa?"

Studi ini dilakukan berdasarkan penelitian lapangan pada Mei–Juni 2022 di Desa Gedong dan Desa Rowoboni di Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian lapangan dilaksanakan sebagai studi kasus yang membandingkan dua desa berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi, produksi pertanian, dan konteks geografis. Terlepas dari banyaknya perbedaan di antara keduanya, Desa Gedong dan Desa Rowoboni relatif mudah diakses dari kota terdekat, yakni Salatiga. Aksesibilitas ini memastikan bahwa individu dan rumah tangga memiliki akses terhadap pekerjaan yang produktif di luar sektor pertanian karena Salatiga menyediakan peluang di sektor industri dan jasa.

Studi kasus ini menggabungkan wawancara semiterstruktur, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions* atau FGD), observasi kegiatan, mesin, fasilitas, serta konteks geografis pertanian lainnya, seperti di wilayah Danau Rawa Pening. Secara keseluruhan, dilakukan 15 wawancara dan 5 FGD, dengan total peserta sejumlah 39. Petani yang berpartisipasi dalam wawancara dan FGD di kedua desa mengelola lahan pertanian kecil yang luasnya berkisar pada 0,1 hingga 0,76 hektar. Ini tidak termasuk pemilik lahan subur dengan luas besar yang memilih untuk menyewakan lahannya kepada petani penggarap.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Gedong (populasi: 2.445 [Desember 2021]) terletak di kaki Gunung Merbabu dan menduduki lahan pertanian bernilai relatif tinggi yang memberikan opsi bagi para petani untuk mendiversifikasikan tanaman serta kegiatan pertaniannya. Wilayah atasnya digunakan untuk agroforestri yang terdiri atas kopi, cengkeh, alpukat, durian, petai, dan sawah tadah hujan, serta peternakan sapi perah di Dusun Banyudono¹² yang dikenal memperoleh banyak pendapatan dari produksi susunya. Sementara itu, wilayah bawahnya sebagian besar adalah lahan sawah irigasi yang dibuat tumpang sari dengan tanaman sayuran, cabai, lemon, dan tanaman sekunder lainnya. Pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar) tersedia di Desa Gedong, tetapi warga harus pergi ke desa atau kota tetangga untuk sekolah menengah pertama dan atas. Air tawar berlimpah di Desa Gedong berkat medan pegunungannya dan keberadaan beberapa air mata alami.

Desa Rowoboni (populasi: 2.741 [Februari 2023]) terletak di bagian bawah Banyubiru di sekitar Danau Rawa Pening. Berbeda dari Desa Gedong yang menunjukkan beragam peluang bagi pekerja dan rumah tangga pertanian, Desa Rowoboni menggambarkan kehidupan perdesaan yang tidak menentu. Pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian di desa ini mayoritas adalah budi daya beras, perikanan tangkap berskala kecil, dan budi daya ikan menggunakan jaring ikan—semuanya bergantung kepada danau. Tanaman utamanya, beras, ditanam bertumpang sari dengan cabai dan sayuran. Sejumlah rumah tangga juga mengumpulkan eceng gondok dari sekitar danau untuk dijadikan atau dijual sebagai bahan kering untuk tas, keranjang, dan kerajinan tangan lainnya. Seperti Desa Gedong, fasilitas pendidikan dasar tersedia di Desa Rowoboni, tetapi pendidikan di atas itu hanya tersedia di luar desa.

Sejak 2019, sejumlah sawah di sekitar Danau Rawa Pening tergenang air danau yang naik, dan rumah tangga yang terdampak tidak lagi dapat menanam padi atau tanaman lainnya.

Sejak 2019, sejumlah sawah di sekitar Danau Rawa Pening tergenang air danau yang naik, dan rumah tangga yang terdampak tidak lagi dapat menanam padi atau tanaman lainnya. Mereka terpaksa beralih mencari ikan atau bekerja di kota. Menurut beberapa petani dan warga desa yang diwawancarai, banjir ini merupakan akibat dari program revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) (Wawancara 3, Wawancara 4, FGD 1).

Program ini dimandatkan dalam Perpres No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang menetapkan 15 danau di seluruh Indonesia, termasuk Danau Rawa Pening, sebagai danau prioritas nasional karena status degradasi tinggi serta nilai ekonomi, ekologi, sosial-budaya, dan ilmiahnya.¹³ Melalui program Kementerian PUPR ini, danau-danau prioritas nasional akan direvitalisasi dan dikembalikan fungsi alaminya sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan eceng gondok, pembuatan tanggul, dan penataan kawasan daerah aliran sungai (Kementerian PUPR, 2019).

¹²Dusun adalah wilayah administratif di bawah desa dalam sistem administrasi Indonesia.

¹³Meski perpres ini diterbitkan pada 2021, revitalisasi telah berjalan sejak setidaknya 2016 dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2017; Kementerian PUPR, 2019).

Para petani juga menolak penetapan garis sempadan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 365/2020, yakni berjarak 50 meter ke tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, dengan elevasi 463,30 meter di atas permukaan laut (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022). Menurut sebuah laporan yang mengutip otoritas danau,¹⁴ lahan yang berada di belakang garis sempadan akan menjadi milik pemerintah (Putri, 2022). Kasus Desa Rowoboni menunjukkan bagaimana pengelolaan bentang lahan (lanskap) alami untuk memenuhi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berujung pada persoalan yang kerap terjadi dalam akuisisi lahan dan relokasi di Indonesia.

¹⁴ Danau Rawa Pening dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dengan wewenang yang meliputi daerah aliran sungai, danau, dan sistem irigasi dalam sistem sungai Jratunseluna dan Pemali-Comal di Jawa Tengah.

PENGHIDUPAN, TANTANGAN, DAN ASET

Beberapa rumah tangga petani di dua desa ini melakukan kegiatan pertanian subsisten. Bilamana tidak ada pendapatan, rumah tangga termiskin (yakni, rumah tangga dengan lahan kurang lebih 0,10 hektar yang tidak memiliki pendapatan alternatif) hanya mengonsumsi beras, sayuran (seperti daun singkong dan pepaya dari kebun mereka), dan sambal (FGD 1, FGD 2, FGD 3, FGD 4).

“**Sebagian besar petani beras tidak mengonsumsi produk mereka sendiri. Mereka lebih memilih membeli beras daripada menggiling padinya.**”

Di luar petani subsisten, sebagian besar petani beras tidak mengonsumsi produk mereka sendiri. Mereka lebih memilih membeli beras daripada menggiling padinya karena sering kali hal tersebut lebih mahal. Harga beras yang lebih tinggi pada tingkat konsumen tidak serta-merta berarti bahwa harga yang diterima oleh petani juga lebih tinggi¹⁵. Alih-alih meningkatkan pendapatan dan daya beli petani, kenaikan harga membuat para petani lebih miskin.

Pada masa panen, petani langsung menjual hasil panennya kepada tengkulak yang akan membawa alat panen, menaksir nilai hasil panen setelah dikurangi bayaran mereka, dan menjualnya ke pasar besar di kota. Sistem ini biasa disebut sebagai sistem tebas.

Ketika masa panen tiba, tanaman harus segera dipanen supaya tidak rusak. Karena waktu yang mepet dan adanya kebergantungan pada tengkulak, serta kesulitan mencari buruh pertanian, petani memiliki daya tawar yang lebih rendah dan kerap menerima berapa pun harga dari tengkulak. Ada beberapa tengkulak yang dapat petani pilih sehingga mereka dapat membandingkan harga dan kesepakatan lainnya (FGD 4). Namun, tidak ada tengkulak yang berasal dari Desa Gedong maupun Desa Rowoboni. Beberapa berasal dari Demak (jarak 1,5 jam perjalanan darat dari Banyubiru) dan mengumpulkan beras dari sejumlah daerah yang berbeda-beda. Secara umum, petani bergantung pada tengkulak dan akan menjual hasil panennya segera ketika mereka datang ke desa. Apabila melewatkan kedatangan tengkulak, mereka bisa jadi tidak dapat menjual hasil panen sama sekali karena tengkulak selalu berpindah dari desa ke desa (FGD 1).

Sumber daya juga mengalir melalui ekonomi hadiah (gift economy) komunal. Warga desa memiliki kewajiban secara kultural untuk memberi uang dalam jumlah tertentu kepada warga yang mengadakan acara-acara sosial, seperti pernikahan, perayaan kelahiran, atau pemakaman. Jumlahnya berkisar pada Rp30.000–50.000 (sekitar US\$ 2–3) jika yang mengadakan acara adalah tetangga biasa, hingga Rp200.000 (sekitar US\$ 13) jika ia adalah saudara. Seorang warga dapat mengeluarkan hingga ratusan ribu rupiah apabila ia menghadiri beberapa undangan dalam seminggu. Signifikansi kebudayaan dari praktik ini memunculkan rasa malu jika mereka memberi dalam jumlah sedikit. Bahkan, mereka tak jarang harus meminjam kepada saudara untuk keperluan ini (FGD 4, Wawancara 1).

¹⁵ Seperti yang juga ditemukan oleh Naylah *et al.* (2021).

Tantangan finansial yang dihadapi oleh rumah-rumah tangga petani mayoritas berakar dari tingginya biaya pertanian dalam pengadaan benih, pupuk, herbisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya untuk mengendalikan hama, biaya tenaga kerja, sewa lahan (untuk petani penggarap) dan alat, transportasi, serta biaya pascapanen. Biaya tenaga kerja berasal dari kebutuhan (khususnya para petani tua atau mereka yang mengelola lahan yang luas) untuk mengalihdayakan beberapa pekerjaan, seperti penyiangan dan pemipilan, kepada buruh pertanian. Ketika panen, tenaga kerja biasanya disediakan oleh tengkulak sebagai bagian dari pengaturan tebas.

Irigasi menjadi sebuah masalah di Desa Rowoboni yang terletak di wilayah bawah dan mendapatkan air dari sungai di sekitarnya yang mengalir ke Danau Rawa Pening. Lokasi geografis desa ini mengakibatkan air sedikit mengalir pada musim kemarau dan terlalu banyak pada musim hujan. Sawah-sawah di tepi Danau Rawa Pening sering terendam banjir di musim hujan karena pihak pengelola danau mempertahankan permukaan air yang tinggi untuk kebutuhan listrik (FGD 1).

Sementara mayoritas petani di Desa Rowoboni masih menanam padi, tanaman musiman seperti beras tidak lagi menjadi tanaman dagang utama bagi mereka. Karena beras dipanen hanya sekali dalam setahun—dan tidak ada panen dari sawah yang terendam—petani kian bergantung pada penjualan ikan dan sayuran untuk pendapatan sehari-hari (FGD 1).

Pekerja pertanian pun makin sulit dicari karena para pemuda banyak meninggalkan bertani. Hal ini disebabkan kegiatan pertanian tidak menghasilkan pendapatan yang tinggi dan pasti. Tren ini tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan masyarakat berusia muda yang berubah, tetapi juga orang tua mereka. Mereka yang berasal dari keluarga yang telah bertani dari generasi ke generasi mulai mempertimbangkan untuk beralih ke pekerjaan lain agar lebih mapan dan memiliki pendapatan yang pasti. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak lagi dapat bertahan atau mau mengambil risiko di sektor pertanian. Petani lebih memilih agar anaknya mempunyai pekerjaan sebagai karyawan toko, pekerja pabrik, atau pegawai negeri, alih-alih mengikuti langkah mereka. Para orang tua petani bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa lahan yang mereka miliki akan dijual ketika anak-anaknya beranjak dewasa, lalu uangnya akan dibagikan kepada mereka (FGD 4).

Kepemilikan aset yang lebih beragam dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan finansial petani. Pertama, tanah merupakan aset utama seorang petani. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri mengelola lahan milik orang lain melalui beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang paling banyak digunakan adalah “*maro*” (arti harfiah: “setengah”), yakni sebuah kesepakatan bagi hasil (petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi dan membagi setengah hasilnya dengan pemilik lahan). Sejumlah pemilik lahan juga dapat menyewakan lahannya dengan kontrak tahunan. Rata-rata harga sewa pada 2022 adalah 15 juta rupiah (hampir US\$ 1.000) per hektar per tahun (Wawancara 2). Bagi petani penggarap, dalam hal risiko dan distribusi keuntungan, kesepakatan bagi hasil dan sewa lahan ini membutuhkan biaya tinggi dan lebih merugikan daripada bagi pemilik lahan (FGD 2).

Kepemilikan aset yang lebih beragam dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan finansial petani.

Aset kedua yang banyak dimiliki oleh petani adalah hewan ternak, seperti kambing, sapi, dan ayam. Hewan ternak menyimpan nilai, dan pemeliharaannya dapat menghasilkan sumber pendapatan tambahan dari susu dan telur, atau pupuk dari limbah ternak. Mereka yang memiliki ayam di rumah biasanya memelihara untuk konsumsi sendiri, alih-alih untuk dijual. Sejumlah rumah tangga petani juga membuka toko kecil atau warung di rumah, sementara lainnya yang bekerja sebagai tengkulak memiliki truk pikap.

“**Status sosial memengaruhi perbaikan kesejahteraan.**”

Ketiga, status sosial memengaruhi perbaikan kesejahteraan. Seorang perangkat desa atau kerabat perangkat desa dapat memperoleh kepemilikan tanah bengkok, atau tanah yang mulanya merupakan milik desa, tetapi telah berganti kepemilikan karena dibagikan kepada perangkat desa. Seperti lahan biasa, tanah bengkok sering disewakan kepada petani penggarap.¹⁶ Warga desa yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat desa cenderung lebih mudah mendapatkan bantuan (seperti jaring ikan untuk nelayan, sembako, renovasi rumah, dan bantuan langsung tunai) karena penyaluran program-program ini dilakukan melalui perangkat desa (untuk pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan).

¹⁶ Untuk analisis terkait lahan milik desa, lihat Krishnamurti *et al.* (2019).

STRATEGI PENGHIDUPAN RUMAH TANGGA PETANI

Rumah tangga petani di kedua desa memiliki sejumlah strategi untuk mempertahankan standar kesejahteraan. Pertama, mereka menurunkan biaya pertanian dan meminimalkan risiko dengan mengurangi penggunaan pupuk dan input lainnya. Mengelola lahan dengan ukuran yang lebih kecil, atau menyewakan lahan alih-alih mengelolanya sendiri (bagi mereka yang memiliki lahan cukup luas), juga meminimalkan risiko karena lahan besar membutuhkan pemeliharaan dan pengawasan yang ketat demi mencegah serangan hama dan penyakit.

Strategi kedua adalah diversifikasi pendapatan. Mayoritas rumah tangga petani telah memiliki sumber pendapatan tambahan, baik dari pertanian (seperti tumpang sari, bekerja sebagai operator mesin, mencari ikan, beternak, berdagang/menjadi tengkulak) maupun luar pertanian (bermigrasi ke kota untuk pekerjaan upahan [seperti di industri pakaian di Semarang dan Surakarta], mengumpulkan eceng gondok untuk kerajinan). Sebagian besar petani menerapkan tumpang sari guna memaksimalkan potensi lahan dan menambah pendapatannya, alih-alih memperluas kepemilikan lahannya. Petani beras biasanya menggunakan ruang kosong di sawahnya untuk ditanami tanaman sekunder, seperti jagung, kacang tanah, cabai merah, dan sayuran.

Di lereng bukit Desa Gedong yang didominasi oleh perkebunan kopi, petani juga menerapkan tumpang sari dengan tanaman seperti cengkeh, durian, pisang, dan alpukat. Perkebunan kopi tidak membutuhkan perawatan intensif sehingga petani dapat menanam tanaman lain yang dibuat tumpang sari dengan kopi atau menanam di lahan lain. Petani kopi dapat memanen dua kali dalam setahun dan menghasilkan pendapatan yang besar dengan mengolah buah kopi menjadi biji kopi mentah sebelum menjualnya ke tengkulak. Menurut pengolah kopi setempat di Desa Gedong, harga jual buah kopi adalah Rp3.000 (US\$ 0,2) per kilogram, sementara biji kopi hijau dapat dijual dari harga Rp30.000 (US\$ 2) jika belum dipilah hingga Rp60.000 (US\$ 4) untuk biji matang yang sudah dipilah.

Nelayan dapat menangkap tiga hingga lima kilogram ikan tilapia setiap harinya di Danau Rawa Pening untuk kemudian dijual kepada tengkulak untuk mendapatkan uang secara cepat. Mereka memperoleh rata-rata Rp50.000 (sekitar US\$ 3,33) per hari dengan menjual ikan. Namun, mereka juga harus menyewa perahu seharga Rp20.000 per hari (sekitar US\$ 1,33). Pihak otoritas danau tengah berupaya mengangkat eceng gondok yang menjadi sumber utama endapan dan menciptakan masalah seperti banjir, penyusutan luas danau, dan degradasi kualitas air. Pengangkatan eceng gondok juga menguntungkan nelayan karena mempermudah navigasi di air. Di sisi lain, upaya ini justru mengancam penghidupan pengrajin kecil dan warga lainnya yang bekerja mencari eceng gondok. Dengan kata lain, konservasi danau memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap para warga yang mengambil manfaat dari danau, dan dampak-dampak tersebut harus dipertimbangkan oleh otoritas danau.

Diversifikasi pendapatan membutuhkan keterampilan dan kualifikasi yang tidak dimiliki semua orang. Bekerja sebagai pekerja pabrik atau pramuniaga membutuhkan setidaknya ijazah SMA. Di kedua desa, hanya terdapat sekitar seperempat warga yang merupakan lulusan SMA.¹⁷ Hambatan gender juga menjadi faktor yang memengaruhi karena ibu tidak dapat meninggalkan anaknya di rumah untuk bekerja di kota (Wawancara 3). Dalam kasus ini, pertanian terkadang lebih mengakomodasi para ibu karena mereka bisa membawa anak ke sawah.

Peralihan pekerjaan dari sektor pertanian makin jamak terjadi, tetapi jarang dilakukan oleh semua anggota keluarga. Beberapa anggota rumah tangga petani biasanya tetap tinggal di desa sebagai petani, sementara anggota lainnya menyokong keluarga dengan mengirimkan sebagian upahnya dari hasil bekerja di kota.

¹⁷ Menurut data demografi setiap desa yang diperoleh dari Kantor Desa Gedong dan perangkat desa di Desa Rowoboni. Data untuk Desa Gedong adalah per Desember 2021, sementara data untuk Desa Rowoboni adalah per Februari 2023.

PERAN KEBIJAKAN DAN LEMBAGA

Bantuan Input, Alat, dan Mesin

Pemberian input, alat, dan mesin pertanian secara gratis atau bersubsidi adalah bentuk kebijakan dan program yang paling umum dilaksanakan untuk mendukung petani di kedua desa. Bantuan jenis ini didasarkan pada konsepsi kesejahteraan sebagai fungsi produksi.

Kedua desa sering menerima alat dan mesin pertanian, seperti traktor, alat penanam bibit padi, alat perontok padi, dan mesin pemotong rumput. Komunitas nelayan di Desa Rowoboni terkadang juga menerima perahu dan alat penangkap ikan, seperti jaring. Empat digester biogas juga diberikan kepada peternak sapi perah atau rumah tangga yang memiliki hewan ternak di Dusun Banyudono. Bantuan ini sebagian besar berasal dari pemerintah yang didanai oleh dana desa,¹⁸ program-program Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Kabupaten, atau dana aspirasi, yaitu dana yang diterima anggota DPRD untuk daerah yang diwakilinya.

Petani melihat adanya beberapa kelemahan pada bantuan dalam bentuk alat, mesin, atau input gratis. Pertama, mesin seperti traktor diberikan per kelompok tani atau desa, dan rumah tangga yang dipilih untuk memegangnya ditentukan berdasarkan kedekatan sosial mereka dengan perangkat desa. Karena terkadang hanya tersedia satu mesin untuk satu desa, petani harus membayar sewa atau membagi hasil dengan kelompok tani untuk menggunakannya (Wawancara 2, Wawancara 4, Wawancara 5, FGD 1). Karena pertanian adalah kegiatan musiman, sering kali sulit untuk menemukan mesin yang tersedia untuk disewa, atau orang yang bisa mengoperasikannya, dalam musim tanam atau panen.

Kedua, bantuan ini tidak mempertimbangkan faktor geografis, teknik bertani, atau preferensi petani. Para petani di Desa Gedong tidak menggunakan traktor bantuan karena kontur tanah yang miring di daerah desa yang berbukit (Wawancara 5, Wawancara 7). Alat perah yang diberikan oleh pemerintah juga kurang disukai oleh peternak sapi perah setempat karena cenderung melukai puting sapi (FGD 2). Petani beras di Desa Rowoboni lebih memilih untuk menggunakan benih lokal daripada benih Ciherang yang diberikan sebagai bantuan (FGD 1, FGD 4, Wawancara 9).

Ketiga, sejumlah bantuan teknologi diberikan sebagai program sekali saja tanpa tindak lanjut yang memadai. Seorang petani di Desa Rowoboni mengatakan bahwa desa ini pernah menerima alat penanam bibit padi, tetapi lama kelamaan tidak ada yang menggunakannya dan entah di mana alat itu disimpan sekarang (Wawancara 7). Hal ini juga ditemukan dalam studi CIPS tentang transfer teknologi untuk peternak sapi perah: peternak cenderung tidak mengadopsi teknologi baru dalam jangka panjang karena tidak dibarengi dengan dukungan teknis dan pengetahuan (Budiman & Alta, 2022).

Pemberian input, alat, dan mesin pertanian secara gratis atau bersubsidi adalah bentuk kebijakan dan program yang paling umum dilaksanakan untuk mendukung petani di kedua desa.

¹⁸Dana desa adalah dana yang diperoleh dari APBN dan ditransfer ke desa melalui APBD. Dana ini dapat digunakan untuk program-program tata kelola pemerintahan desa, pembangunan, sosial, dan pemberdayaan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dengan pedoman prioritas alokasi tahunan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Seperti halnya ditemukan dalam beberapa studi (Alta *et al.*, 2021; Ruslan, 2021), petani bergantung pada pupuk yang murah dan bersubsidi untuk mengurangi biaya produksi. Kelangkaan sudah sering terjadi, dan petani sering kali menerima pupuk bersubsidi lebih sedikit daripada yang mereka butuhkan atau lewat musim tanam. Petani dan bahkan perangkat desa meyakini bahwa aktor-aktor buruk dalam rantai distribusi adalah penyebab kelangkaan dan alokasi yang tidak tepat yang membuat petani tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan (FGD 5), dan tidak tahu bahwa subsidi pupuk hanya memenuhi 37–51% kebutuhan pupuk nasional setiap tahun (Alta *et al.*, 2021). Namun, penjualan pupuk secara ilegal di atas harga eceran tertinggi (HET) adalah praktik yang lazim ditemui. Toko pertanian setempat mengatakan bahwa harga tinggi untuk menutupi biaya logistik dan transportasi yang ditanggung oleh penjual (FGD 5). Padahal, biaya-biaya tersebut seharusnya sudah termasuk dalam hitungan HET. Temuan ini selaras dengan laporan media bahwa terdapat penjualan ilegal pupuk dengan harga di atas HET meski aparat terus berupaya membongkar sindikat ini (Kompas, 2022; Saputra, 2022).

Petani mengklaim kuota pupuk bersubsidi dengan menunjukkan kartu taninya. Studi kami mengonfirmasi temuan bahwa distribusi dan adopsi kartu oleh petani masih belum memadai dan merata (Alta *et al.*, 2021) akibat lambannya proses pendaftaran (FGD 5) dan ketidaktahuan petani, terutama yang berusia tua, tentang proses dan persyaratan untuk mendapatkan kartu tani (FGD 3). Di Desa Gedong, sejumlah petani mengakali kelangkaan pupuk bersubsidi dengan membagi kartu dan jatah mereka. Petani yang mengelola perkebunan jagung dan singkong berskala kecil mengatakan bahwa kebutuhan mereka akan pupuk tidak sebesar petani beras, dan maka dari itu mereka membagi sisa jatahnya kepada petani lain yang membutuhkan. Pembagian jatah ini difasilitasi oleh kelompok tani (FGD 3). Temuan-temuan ini menunjukkan keterbatasan subsidi pupuk dalam memenuhi preferensi petani.

Fasilitas Pascapanen, Infrastruktur, dan Akses Pasar

Permintaan yang paling umum dari petani adalah bantuan untuk meningkatkan akses terhadap alat dan fasilitas pascapanen. Akses jalan telah membantu perekonomian setempat dengan memperbaiki pengangkutan hasil panen ke pasar terdekat. Jalan aspal yang menghubungkan bagian atas Desa Gedong baru dibangun pada 1998. Sebelumnya, Banyudono menjadi dusun termiskin karena lokasinya. Kini, dusun ini menjadi bagian desa yang paling makmur berkat peternakan-peternakan sapi perahnya. Perbaikan akses jalan secara lebih lanjut, seperti melalui pembangunan jalan usaha tani, masih diharapkan oleh warga desa untuk membantu transportasi hasil panen dan input dari dan ke lahan (FGD 1).

Permintaan yang paling umum dari petani adalah bantuan untuk meningkatkan akses terhadap alat dan fasilitas pascapanen.

Pembangunan pasar yang dekat dengan lahan pertanian tidak selalu berguna. Pemerintah setempat telah membangun pasar tradisional di desa, tetapi menurut para petani di Desa Rowoboni, pasar ini tidak banyak dikunjungi karena konsumen dapat membeli langsung dari petani atau penggiling dengan harga yang lebih murah (FGD 1). Akses pasar juga menjadi masalah bagi petani yang tertarik dengan pertanian organik. Kendati sejumlah petani telah beralih menggunakan limbah ternak (manur) dan mengurangi pestisida, pertanian organik tidak didukung oleh akses pasar terhadap konsumen yang sadar dan mau membayar lebih untuk produk organik. Hal ini berbeda dengan petani-petani dengan skala yang lebih besar di desa tetangga yang petaninya memiliki akses terhadap pedagang produk organik di Jakarta dan kota-kota lain (Wawancara 8).

Petani juga menginginkan dukungan mesin pascapanen, seperti pengering, pencacah rumput, dan penggiling beras. Umumnya, mesin-mesin ini dimiliki oleh pedagang dan tengkulak. Dalam pengaturan tebas, mereka memperkirakan nilai hasil panen dan membantu petani memanen serta menyiapkan hasilnya dengan biaya yang dikurangi dari nilai transaksi. Perangkat desa di Desa Gedong ingin menggantikan tengkulak dengan mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang akan memiliki dan mengoperasikan mesin pascapanen serta mengambil alih peran pedagang dalam memasarkan hasil panen. BUMDes tersebut juga akan memiliki lumbung sendiri untuk menyimpan gabah dan menunda penjualan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi (FGD 5).

Program-Program Bantuan Sosial

Program-program bantuan sosial yang diterima oleh warga desa meliputi BLT, BLT bersyarat dari PKH,¹⁹ sembako,²⁰ renovasi rumah melalui dana aspirasi, dan perlindungan sosial dalam bidang pendidikan (PIP) dan kesehatan (JKN).²¹ BLT sejumlah Rp200.000 (sekitar US\$ 13) per bulan selama tiga bulan diberikan pada awal masa pandemi, tetapi menurut warga desa, banyak warga miskin tidak menerimanya.

Isu terkait inklusi/eksklusi dan penargetan yang kurang tepat menjadi persoalan yang saat ini banyak terjadi pada program-program bantuan sosial di Indonesia. Sejak 2012, DTKS telah digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi penerima bantuan-bantuan sosial. Daftar dari DTKS digabungkan dengan musyawarah desa dan masukan dari fasilitator program setempat untuk memverifikasi, memperbarui, dan menghasilkan daftar akhir penerima bantuan (Katiman, 2023). Permensos No. 3/2021 mengatur bahwa DTKS perlu diperbarui sekali dalam sebulan. Namun, menurut sebuah laporan dari Bank Dunia, DTKS sudah usang dan lama tidak diperbarui, dan sebagian besar basis datanya masih berisi informasi dari tahun 2015 (Bank Dunia, 2023c).

Isu-isu terkait eksklusi kian diperparah oleh pandemi. Di Desa Gedong dan Desa Rowoboni, “orang-orang miskin baru” muncul karena banyak orang jatuh miskin karena kehilangan kemampuan untuk bekerja selama masa pandemi. Karena mereka baru jatuh miskin ketika pandemi, mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Wawancara 1, FGD 4). Sebuah laporan dari Bank Dunia dari Juni 2020 menemukan bahwa sekitar 46% dari populasi B40 belum menerima bantuan sosial sama sekali (Bank Dunia, 2020).

Banyak warga desa juga menjadi penerima dalam program Sembako, yaitu subsidi pangan langsung untuk rumah tangga miskin²² sebesar Rp200.000 (US\$ 13) per bulan (dari Januari–Maret 2022, menurut Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No. 29/2022).

Isu terkait inklusi/eksklusi dan penargetan yang kurang tepat menjadi persoalan yang saat ini banyak terjadi pada program-program bantuan sosial di Indonesia.

¹⁹ Baik PKH maupun program Sembako ditargetkan untuk rumah tangga/keluarga miskin (sesuai garis kemiskinan BPS) yang tercatat dalam DTKS. Untuk menerima BLT bersyarat dalam PKH, sebuah keluarga harus memenuhi salah satu kriteria (seperti memiliki anggota keluarga ibu hamil atau penyandang disabilitas) dan syaratnya (seperti mendapatkan perawatan sebelum kelahiran untuk ibu hamil). Jumlah bantuan dapat mencapai 3 juta rupiah per tahun per anggota keluarga yang memenuhi syarat (maksimal empat anggota keluarga).

²⁰ Sebelumnya dikenal sebagai bantuan pangan nontunai (BPNT). Untuk analisis tentang BPNT, lihat Ilman (2020).

²¹ Untuk analisis menyeluruh tentang PKH, JKN, dan PIP, lihat Patunru dan Respatiadi (2017).

²² Sebagaimana didefinisikan oleh garis kemiskinan dari BPS.

Uang tersebut dapat dibelanjakan di e-warung²³ yang ditunjuk untuk membeli berbagai bahan makanan, termasuk beras; protein hewani, seperti telur, daging sapi, daging ayam, dan ikan; protein nabati, seperti tempe dan tahu; serta sayuran dan buah-buahan. Kendati sebagian besar warga desa setuju bahwa program ini bermanfaat, petani beras di kedua desa merasa kurang puas karena mereka menganggap program ini menyingkirkan produk mereka sehingga menyulitkan penjualan beras dan mengurangi harga (FGD 1, FGD 3). Menurut petani-petani di Desa Gedong, tetangga mereka yang dulunya membeli beras dari toko mereka kini membeli dari e-warung (FGD 3). Petani di Rowoboni menyebutkan adanya bantuan beras yang secara langsung diberikan ke rumah-rumah penerimanya, menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih program dari tingkat pemerintahan yang berbeda-beda (FGD 1).

Revitalisasi Danau Rawa Pening

Rumah tangga yang sawahnya terendam banjir di tepi Danau Rawa Pening mendapatkan keringanan pajak properti satu kali dan lima kilogram beras per anggota rumah tangga dari pemerintah kabupaten pada 2021. Tentu saja, mereka tidak menganggap kompensasi ini cukup

Rumah tangga yang terdampak menuntut pemerintah untuk menghapus garis sempadan, memastikan bahwa petani dan nelayan dapat terus bekerja, transparan dalam hal pembangunan dan relokasi, serta memberikan kompensasi yang layak untuk waktu ketika mereka tidak dapat mengelola lahan pertaniannya.

atas kerugian yang mereka rasakan. Melalui Forum Petani Rawa Pening Bersatu, petani telah melakukan sejumlah unjuk rasa, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, dan mengirimkan surat kepada perwakilan rakyat setempat, Wali Kota Surakarta, dan bahkan Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut pemerintah untuk menghapus garis sempadan, memastikan bahwa petani dan nelayan dapat terus bekerja, transparan dalam hal pembangunan dan relokasi, serta memberikan kompensasi yang layak untuk waktu ketika mereka tidak dapat mengelola lahan pertaniannya (Wawancara 4; Wawancara 5; Rahadi, 2022).

Setelah serangkaian unjuk rasa dan dengar pendapat, bupati dan kepolisian setempat menjamin bahwa petani akan dapat memanen setidaknya sekali pada 2022 (Wawancara 4, Wawancara 5), dan pada kuartal keempat tahun tersebut, mereka dapat menanam pada sawah yang sebelumnya terendam. Hal ini membutuhkan kesepakatan antara Forum Petani Rawa Pening Bersatu, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menurunkan permukaan air hingga lebih dari dua meter di bawah apa yang dimandatkan oleh Keputusan Menteri PUPR No. 365/2020, menjadi 461 meter di atas permukaan laut. Akan tetapi, menurut seorang anggota Forum Petani Rawa Pening Bersatu, tidak ada rencana untuk merevisi keputusan menteri ini pada tingkat nasional. Rencana revitalisasi masih tidak jelas bagi para warga desa dan tidak ada komunikasi terkait akuisisi lahan dan relokasi. Meski kesepakatan dan panen telah diterima dan Forum Petani Rawa Pening Bersatu mengurangi kegiatannya pada awal 2023, petani tidak akan berhenti menuntut kompensasi dan transparansi revitalisasi (Wawancara 6).

²³ E-warung adalah penjual yang ditunjuk oleh pemerintah dengan jejaring pemasok yang sudah ada. Beberapa e-warung adalah toko dan pedagang yang sudah ada sebelumnya yang tidak melayani konsumen dari program Sembako saja. Untuk informasi lebih lanjut mengenai e-warung di bawah BPNT (pendahulu program Sembako), lihat Ilman (2020).

²⁴ Menurut seorang pimpinan kelompok tani, petani di Desa Rowoboni umumnya tidak memiliki asuransi pertanian. Kurangnya kesadaran serta proses pendaftaran dan syarat dan ketentuan yang dianggap rumit dikutip sebagai alasan di balik rendahnya minat petani (Wawancara 6). Alasan yang sama juga ditemukan dalam studi CIPS lainnya (Patunru & Respatiadi, 2017). Namun, pun jika petani yang terdampak memiliki asuransi, mereka tidak dapat menerima kompensasi. Pedoman Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menyebutkan bahwa syarat usia tanaman minimal untuk gagal panen adalah 10–30 hari setelah ditanam (Kementan, 2021). Banjir di Desa Rowoboni bisa jadi tidak termasuk dalam cakupan ini karena petani dari awal sudah tidak bisa menanam.

Kasus Danau Rawa Pening ini menunjukkan pentingnya mengakui berbagai fungsi bentang lahan dan geografi bagi penghidupan, perekonomian, dan lingkungan setempat dalam proyek pembangunan bentang lahan apa pun. Terdapat banyak contoh inisiatif pengelolaan bentang lahan berkelanjutan yang dipimpin oleh masyarakat setempat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dapat dipelajari oleh proyek Rawa Pening. Beberapa di antaranya adalah Gerakan Rejoso Kita di Daerah Aliran Sungai Rejoso, Pasuruan; Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) untuk mengurangi emisi dari kehutanan dan penggunaan lahan; serta pengelolaan bentang lahan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi (NKT/SKT) selain nilai ekonomi tinggi dari tanaman perkebunan di Lalan, Musi Banyuasin.

KESIMPULAN

Kesejahteraan yang dipertimbangkan dengan baik merupakan konsep kompleks yang menghubungkan faktor-faktor kontekstual (seperti geografi, iklim, dan sosial-ekonomi); sumber daya penghidupan atau aset; kebijakan, lembaga, dan relasi sosial; strategi penghidupan; dan, yang terakhir, capaian kesejahteraan. Menggunakan studi kasus Desa Gedong dan Rowoboni, makalah ini menunjukkan komponen-komponen dari setiap elemen penghidupan dan bagaimana semuanya berinteraksi untuk menghasilkan perbaikan atau penurunan kesejahteraan. Penerapan pendekatan analisis kebijakan ini dalam studi kasus tersebut menghasilkan wawasan berikut (Tabel 4).

Kesejahteraan yang dipertimbangkan dengan baik merupakan konsep kompleks yang menghubungkan faktor-faktor kontekstual; sumber daya penghidupan atau aset; kebijakan, lembaga, dan relasi sosial; strategi penghidupan; dan, yang terakhir, capaian kesejahteraan.

Tabel 4.
Kerangka Kerja Penghidupan Berkelanjutan

Faktor Kontekstual	Sumber Daya Penghidupan	Kebijakan, Lembaga, dan Relasi Sosial	Strategi Penghidupan	Capaian Penghidupan
Rawa Pening	Sumber daya alam	Rencana pembangunan danau	Diversifikasi di dalam dan luar sektor pertanian	Penghidupan subsisten
Pandemi COVID-19	Kepemilikan lahan	Subsidi dan bantuan input	Pengurangan biaya pertanian	Penghidupan tidak menentu
Harga input dan komoditas	Alat dan mesin	Bantuan alat dan mesin	Menyewakan lahan	Adaptasi dan peralihan penghidupan secara terpaksa
Struktur kepemilikan lahan	Kekuatan fisik dan keterampilan untuk pekerjaan manual	Bantuan sosial	Mengelola lahan pertanian yang lebih kecil	Pendapatan rumah tangga yang stabil dari gabungan sumber penghidupan anggota keluarga
Infrastruktur lokal	Hubungan dengan pedagang dan pasar	Kebersamaan	Mencari dan beternak ikan	Petani berwirausaha dengan akses ke pasar, kredit, tenaga kerja, dan pengetahuan
Jarak dan akses ke kota	Kendaraan	Hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap	Mengumpulkan eceng gondok	Pemilik lahan menyewakan lahan
Iklim	Hewan ternak	Peran kelompok tani dan pemerintah desa dalam memfasilitasi akses ke bantuan	Membuat kerajinan tangan atau usaha kecil lainnya	
Faktor geografis lainnya yang meningkatkan sistem produksi pertanian (pertanian padi, hortikultura, dan peternakan hewan)	Industri rumahan	Peran forum petani	Bermigrasi dari desa	
	Kiriman uang dari anggota keluarga	Peran pemerintah daerah dan otoritas danau		
	Status sosial dan kedekatan sosial dengan perangkat desa	Ekonomi hadiah		
	Pendidikan			

Sumber: kerangka kerja diadaptasi dari McCarthy *et al.* (2023) dan Scoones (2015)

Peran kebijakan, lembaga, dan relasi sosial sangatlah penting bagi penghidupan dan capaian kesejahteraan karena tiga hal tersebut “memediasi kemampuan untuk menjalankan suatu strategi dan meraih (atau tidak meraih) suatu capaian” (Scoones, 1998: 3).

Harga jual hasil panen dan biaya produksi tidak cukup untuk dijadikan ukuran kesejahteraan petani. Meski memang harga jual hasil panen yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah secara umum menjadi keinginan para petani, dampaknya terhadap kesejahteraan tidaklah transformatif. Petani dan buruh kecil masih “bertahan” ketika mendapatkan harga yang baik karena lahannya yang kecil dan pendapatan pertanian bersifat musiman. Maka dari itu, NTP saja tidak bisa dijadikan indikator kesejahteraan petani.

Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani masih sangat didasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada produksi. Terlepas dari manfaat-manfaat yang dirasakan, berbagai kebijakan yang seperti ini memiliki dampak terbatas terhadap kesejahteraan karena fokusnya sempit, yakni hanya pada *output* dan pendapatan pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut cenderung mengabaikan fakta bahwa petani memiliki sumber daya, aset, strategi, atau berada dalam elemen kontekstual yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan.

Studi kasus menunjukkan bahwa petani berskala kecil dan petani penggarap kesulitan meningkatkan pendapatannya dari pertanian akibat tingginya biaya produksi, pendapatan pertanian yang bersifat musiman, dan lahan kecil yang secara otomatis lebih tidak produktif.

Kebijakan-kebijakan dan program-program yang berorientasi pada produksi, seperti subsidi input dan perlindungan pasar, cenderung memiliki dampak yang terbatas karena hanya menjadi solusi sementara. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi atau harga yang bagus dapat bernapas lega sementara, tetapi kebijakan yang seperti itu tidak memberikan kepastian jangka panjang dalam pekerjaan pertanian.

Program-program perlindungan sosial efektif dalam memastikan keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan hampir miskin—jika benar-benar menjangkau mereka. Program-program seperti bantuan tunai sangatlah bermanfaat ketika terjadi guncangan—seperti pandemi COVID-19, kehilangan pekerjaan, dan bencana alam—untuk memastikan agar mereka dapat bertahan dan mencegah rumah tangga terjerumus lebih dalam ke jurang kemiskinan. Meski kebijakan-kebijakan ini tidak transformatif dalam kerangka kerja penghidupan berkelanjutan, perlindungan dan bantuan sosial memungkinkan masyarakat miskin untuk “bertahan” sembari menyusun strategi untuk “naik kelas” dan “beralih”. Namun, penargetan bantuan sosial perlu diperbaiki, khususnya untuk menjangkau mereka yang status sosial-ekonominya baru berubah, seperti “orang-orang miskin baru” selama pandemi COVID-19.

Untuk memastikan bahwa bantuan pangan tidak menyingkirkan usaha-usaha kecil, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbolehkan penerima program Sembako membeli makanan dari toko mana pun—tidak hanya e-warung—guna mendorong permintaan lokal beras dan bahan makanan lainnya. Dalam sebagian besar kasus, bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk uang tunai lebih baik daripada bantuan dalam bentuk barang.

Pemerintah sangat mengabaikan peran bentang lahan sebagai elemen kontekstual yang penting bagi perekonomian lokal, sebagaimana dapat dilihat dalam proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Temuan-temuan di Desa Rowoboni menunjukkan bahwa pembangunan danau—untuk tujuan lingkungan, energi, dan lainnya—memiliki dampak sosial-ekonomi yang besar, memaksa rumah tangga terdampak untuk mencari pekerjaan baru serta mendorong terbentuknya lembaga dan kegiatan sosial baru (forum petani, kegiatan advokasi, unjuk rasa).

Guna meminimalkan dampak negatif dari proyek pembangunan danau sekaligus mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan, proyek ini perlu mengakui bahwa sifat-sifat bentang lahan dapat memiliki berbagai fungsi. Ekosistem danau dapat menopang pertanian, permukiman, energi, pemanfaatan rekreasi, dll., yang dapat memiliki isu dan tujuan kebijakan publiknya masing-masing.

Pendekatan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan bentang lahan harus berorientasi pada koherensi kebijakan di seputar fungsi-fungsi ini. Selain itu, penerapannya perlu melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dari tingkat nasional, subnasional, dan lokal; memastikan partisipasi lokal yang efektif; serta menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan serta akuntabel.

Subsidi dan pemberian input secara gratis, apabila tersedia bagi petani, dapat membantu mengurangi biaya produksi dan mencapai hasil panen yang optimal. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperbaiki kesejahteraan petani secara signifikan karena bersifat sementara dan subsidi pertanian difokuskan pada sektor tanaman pangan, khususnya beras, sehingga mendistorsi pasar.

Mesin yang disediakan oleh pemerintah di desa tergolong sumber daya publik, tetapi aksesnya dipengaruhi oleh status sosial dan kedekatan dengan lembaga sosial seperti kelompok tani. Teknologi yang disediakan oleh pemerintah umumnya menjangkau orang-orang dengan wewenang yang lebih kuat dan ikatan yang lebih dekat dengan birokrasi. Keberadaan teknologi dan input gratis yang diberikan oleh pemerintah berpotensi menghalangi integrasi pasar melalui investasi oleh aktor swasta di sepanjang rantai nilai. Meski tengkulak dalam taraf tertentu juga memfasilitasi penggunaan teknologi dan integrasi pasar, jumlah mereka terlalu sedikit untuk mencakup pasar yang terlalu banyak sehingga menyebabkan daya tawar yang tidak seimbang antara mereka dan petani.

Peningkatan produktivitas pertanian masih penting agar rumah tangga perdesaan dapat keluar dari—dan menghindari kemiskinan (Bank Dunia, 2023). Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas guna menghasilkan manfaat transformatif bagi petani perlu membingkai kembali kebijakan pertanian agar tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada masa mendatang dengan menciptakan dan menambah peluang melalui perdagangan dan investasi yang terbuka, termasuk yang memfasilitasi pekerjaan di luar sektor pertanian dan di perkotaan.

REFERENSI

Alta, A., Setiawan, I., & Fauzi, A. N. (2021). Beyond fertiliser and seed subsidies. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/publications/beyond-fertiliser-and-seed-subsidies%3A-rethinking-support-to-incentivize-productivity-and-drive-competition-in-agricultural-input-markets>

Amanah, S., Suprehatin, S., Iskandar, E., Eugenia, L., & Chaidirsyah, R. M. (2021). Investing in farmers through public-private-producer partnerships – rural empowerment and agricultural development scaling-up initiative in Indonesia. FAO, IFPRI. <https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7126EN>

Amanta, F., & Wibisono, I. D. (2021). Negative effects of non-tariff trade barriers on the welfare of Indonesians. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/publications/negative-effects-of-non-tariff-trade-barriers-on-the-welfare-of-indonesians>

Bank Dunia (2016). Indonesia's rising divide. *World Bank Group*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>

Bank Dunia (2020). Indonesia high-frequency monitoring of COVID-19 impacts, June 26th, 2020. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/523171610628217948-0070022021/original/IndonesiaCOVIDHiFyR1.pdf>

Bank Dunia. (2021). Beyond unicorns: Harnessing digital technologies for inclusion in Indonesia. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia>

Bank Dunia (2023a). Agriculture, forestry, fishing, value added (% of GDP) - Indonesia. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS>

Bank Dunia (2023b). Employment in agriculture - Indonesia. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS>

Bank Dunia (2023c). Indonesia poverty assessment - pathways towards economic security. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099041923101015385/p17567409bd69f01809b940840b40608e56>

Bappenas. (2017). Menteri Bambang: Pemanfaatan ekosistem danau sebaiknya selaras dengan pembangunan berkelanjutan. *Bappenas*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/menteri-bambang-pemanfaatan-ekosistem-danau-sebaiknya-selaras-dengan-pembangunan-berkelanjutan>

Booth, A. (2000). Poverty and inequality in the Soeharto era: An assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(1), 73-104. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074910012331337793?cookieSet=1>

BPS. (n.d.). Kemiskinan dan ketimpangan. *BPS*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

BPS. (2007). Keadaan pekerja di Indonesia Februari 2007. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2007/05/15/3bc280b9fd93d577d32e714b/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2007.html>

BPS. (2017a). Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menurut provinsi 2012-2017. *BPS*. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1373/1/angka-kematian-balita-per-1000-kelahiran-hidup-menurut-provinsi.html>

BPS. (2017b). Keadaan pekerja di Indonesia Agustus 2017. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2017/11/30/70ab657f1869564f63b7bcfc/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2017.html>

BPS. (2018). Hasil survei pertanian antar sensus (SUTAS) 2018. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/01/02/c7cb1c0a1db444e2cc726708/hasil-survei-pertanian-antar-sensus--sutas--2018.html>

BPS. (2021a). Keadaan pekerja di Indonesia Agustus 2021. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/cad6895cc9045d3053295be9/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2021.html>

BPS. (2021b). Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia 2021. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9c24f43365d1e41c8619dfe4/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2021.html>

BPS. (2022a). Indikator kesejahteraan rakyat 2022. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html>

BPS. (2022b). Indikator perumahan dan kesehatan lingkungan 2022. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/23/9580d8cbc0d52e75f810dfcc/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2022.html>

BPS. (2022c). Konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan provinsi, September 2022. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=konsumsi+kalori&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

BPS. (2022d). Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut daerah tempat tinggal 2020-2022. *BPS*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/2017/1/proporsi-rumah-tangga-dengan-akses-terhadap-pelayanan-dasar-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>

BPS. (2022e). Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan wilayah 2020-2022. *BPS*. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1981/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>

BPS. (2022f). Women and men in Indonesia 2022. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/16/0538dc0f9235bbe0fe792cf8/women-and-men-in-indonesia-2022.html>

BPS. (2023). Keadaan pekerja di Indonesia Februari 2023. *BPS*. <https://www.bps.go.id/publication/2023/06/09/d2c2459397c75a14a92742bf/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2023.html>

Budiman, I., & Alta, A. (2022). Technology and knowledge transfers to dairy farms: Private sector contribution to improve milk production. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/publications/technology-and-knowledge-transfers-to-dairy-farms%3A-private-sector-contribution-to-improve-milk-production?lang=id>

Carney, D., Drinkwater, M., Rusinow, T., Neefjes, K., Wanmali, S., & Singh, N. (1999). Livelihood approaches compared: A brief comparison of the livelihoods approaches of the U.K. Department for International Development (DfID), CARE, Oxfam and the UNDP. A brief review of the fundamental principles behind the sustainable livelihood approach of donor agencies. DFID. <https://www.eldis.org/document/A28159>

Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper 296*. *Institute of Development Studies*. <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/775>

Charlesworth, N. (1983). The origins of fragmentation of landholdings in British India: A comparative examination. In P. Robb (Ed.), *Rural India: Land, power, and society* (pp. 181-215). Curzon Press.

Dorward, A. (2009). Integrating contested aspirations, processes and policy: Development as hanging in, stepping up and stepping out. *Development Policy Review*, 27(2), 131-46.

DPRD Provinsi Jawa Tengah. (2022). Petani Rawa Pening mengadu ke dewan soal dampak revitalisasi. *DPRD Provinsi Jawa Tengah*. <https://dprd.jatengprov.go.id/petani-rawa-pening-keluhkan-proyek-revitalisasi/>

Ellis, F. (2000). Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/rural-livelihoods-and-diversity-in-developing-countries-9780198296966?cc=us&lang=en&>

Food and Agriculture Organization. (2017). Small family farms data portrait. Basic information document.

Methodology and data description. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/smallholders_dataportrait/docs/Data_portrait_variables_description_new2.pdf

Frances, F. (1985). A basic needs approach to development. Palgrave Macmillan UK. [https://www.springerprofessional.de/en/a-basic-needs-approach-to-development/6771740#:~:text=A%20basic%20needs%20\(BN\)%20approach,of%20health%20and%20education%20services.](https://www.springerprofessional.de/en/a-basic-needs-approach-to-development/6771740#:~:text=A%20basic%20needs%20(BN)%20approach,of%20health%20and%20education%20services.)

Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: The processes of ecological change in Indonesia*. University of California Press. https://books.google.co.id/books/about/Agricultural_Involution.html?id=OYtphysz8p10C&redir_esc=y

Haggblade, S., Hazell, P., & Reardon, T. (2010). The rural non-farm economy: Prospects for growth and poverty reduction. *World Development* 38,10: 1429-1441. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X10000963>

Ilbery, B. W. (1984). Farm fragmentation in the Vale of Evesham. *Area*, 16(2), 159-165.

Ilman, A. S. (2020, February). *Effects of high food prices on non-cash food subsidies (BPNT) in Indonesia*. [https://www.cips-indonesia.org/publications/effects-of-high-food-prices-on-non-cash-food-subsidies-\(bpnt\)-in-indonesia---case-study-in-east-nusa-tenggara](https://www.cips-indonesia.org/publications/effects-of-high-food-prices-on-non-cash-food-subsidies-(bpnt)-in-indonesia---case-study-in-east-nusa-tenggara)

Katiman. (2023). Village politics, ritual deliberation and the problem of beneficiary mistargeting in Central Java. In J. McCarthy, A. McWilliam, & G. Nootboom (Eds.), *The paradox of agrarian change: Food security and the politics of social protection in Indonesia* (pp. 326-348). National University of Singapore Press.

Kemenkeu. (n.d.) Program pemulihan ekonomi nasional. *Kemenkeu*. https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pen_kesehatan

Kementerian PUPR. (2019). Kementerian PUPR lakukan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis. *Kementerian PUPR*. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-lakukan-revitalisasi-10-danau-dari-15-danau-kritis>

Kementan. (2020). Rencana strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024. *Kementan*. [https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Draft%20Renstra%202020-2024%20edited%20BAPPENAS%20\(Final\).pdf](https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Draft%20Renstra%202020-2024%20edited%20BAPPENAS%20(Final).pdf)

Kementan. (2021). Pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun anggaran 2021. *Kementan*. <https://psp.pertanian.go.id/storage/72/PEDUM-AUTP2021.pdf>

Kompas. (2022). Investigasi pupuk bersubsidi: Sindikat menguasai pupuk bersubsidi. Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/01/26/sindikat-menguasai-pupuk-bersubsidi>

Krishnamurti, I., Nugraha, A., & Glorya, M. J. (2019). Optimizing the use of village treasury land: A case study of five villages in Central Java. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/publications/optimizing-the-use-of-village-treasury-land%3A-a-case-study-of-five-villages-in-central-java>

Lestari, P., Susetyowati, S., & Sitaresmi, M. N. (2020). Perbedaan asupan makan balita di perkotaan dan perdesaan pada provinsi dengan beban gizi ganda. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(2), 79-86. <https://doi.org/10.22146/ijcn.46304>

McCarthy, J., Nootboom, G., & McWilliam, A. (2023). Agrarian scenarios and nutritional security in Indonesia. In J. McCarthy, A. McWilliam, & G. Nootboom (Eds.), *The paradox of agrarian change: food security and the politics of social protection in Indonesia* (pp. 28-64). National University of Singapore Press.

McCulloch, N. (2008). Rice prices and poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 45-64. <https://doi.org/10.1080/00074910802001579>

Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20(2020), 1-17.

Mushongah, J. (2009). *Rethinking vulnerability: livelihood change in southern Zimbabwe, 1986-2006* (Doctoral dissertation). University of Sussex, England, United Kingdom.

Naylah, M., Nurfadillah, S., & Cahyaningratri. (2021). Market structure, distribution, and rice farmers welfare in Indonesia: Fixed effect model (fem) through Hausman test. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(5), 1–10. <https://www.abacademies.org/articles/market-structure-distribution-and-rice-farmers-welfare-in-indonesia-fixed-effect-model-fem-through-hausman-test-12485.html>

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maladministrasi. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>

Patunru, A., & Respatiadi, H. (2017). Protecting the farmers improving the quality of social protection schemes for agricultural workers in Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/publications/protecting-the-farmers%3A-improving-the-quality-of-social-protection-schemes-for-agricultural-workers-in-indonesia>

Putri, R. A. (2022, September 6). Sempadan Rawa Pening dikeluhkan petani, BBWS bicara pembebasan lahan. Diambil dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6276690/sem-padan-rawa-pening-dikeluhkan-petani-bbws-bicara-pembebasan-lahan/1>.

Rahadi, F. (2022). Ratusan petani Rawapening kembali tagih pemenuhan tuntutan. Diambil dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/rew9cy291/ratusan-petani-rawapening-kembali-tagih-pemenuhan-tuntutan>

Ruslan, K. (2021a). The challenge of monitoring farmers' welfare. Diambil dari <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/10/05/the-challenge-of-monitoring-farmers-welfare.html>

Ruslan, K. (2021b). Food and horticulture crop productivity in Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/publications/food-and-horticulture-crop-productivity-in-indonesia>

Saputra, T. (2022). Jual pupuk bersubsidi di atas HET, 2 pria di Lampung ditangkap. Diambil dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6393314/jual-pupuk-bersubsidi-di-atas-het-2-pria-di-lampung-ditangkap>

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. *IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies*. <https://www.ids.ac.uk/publications/sustainable-rural-livelihoods-a-framework-for-analysis/>

Scoones, I. (2015). Sustainable livelihoods and rural development. <https://practicalactionpublishing.com/book/2123/sustainable-livelihoods-and-rural-development>

SMERU. (2015). Food and nutrition security in Indonesia: A strategic review. Improving food and nutrition security to reduce stunting. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000005506/download/>

Streeten, P., Burki, S.J, Haq, M.U., Hicks, N., and Stewart, F. (1981). First things first: Meeting basic human needs in the developing countries. Oxford University Press. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/882331468179936655/first-things-first-meeting-basic-human-needs-in-the-developing-countries>

Sumaryanto, & Purba, H. J. (2011). Fragmentasi lahan pertanian dan hubungannya dengan produktivitas usaha tani. In S. M. Pasaribu, H. P. Saliem, H. Suparno, E. Pasandaran, F. Pasandaran, & F. Kasryno (Eds.), *Konversi dan fragmentasi lahan ancaman terhadap kemandirian pangan* (pp. 72-92). Badan Litbang Pertanian.

Syahrudin, K., Azrai, M., Nur, A., abid, M., & Wu, W. Z. (2020). A review of maize production and breeding in indonesia. *IOP conference series: Earth and environmental science*, 484, 012040. doi:10.1088/1755- 1315/484/1/012040

United States Department of Agriculture. (2022). TFP indices and components for countries, regions, and countries grouped by income level, 1961–2019. *USDA Economic Research Service*. <https://www.ers.usda.gov/webdocs/DataFiles/51270/AgTFPIInternational2019.xlsx?v=7960.9>

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara 1 – Sulaimah, warga Desa Rowoboni yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi (2022, 2 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 2 – Jono, petani di Desa Gedong (2022, 31 Mei). Komunikasi pribadi.

Wawancara 3 – Uswatun, pemilik usaha kerajinan tangan (2022, 1 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 4 – Khoirul, staf DPRD Kabupaten Semarang (2022, 2 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 5 – Muhlasin, petani dan pemimpin Forum Petani Rawa Pening Bersatu (2022, 1 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 6 – Muhlasin, petani dan pemimpin Forum Petani Rawa Pening Bersatu (2023, 23 Mei). Komunikasi pribadi via panggilan telepon.

Wawancara 7 – Muh Ambyah, kepala dusun di Desa Rowoboni (2022, 1 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 8 – Kusri, petani dan pedagang di Desa Gedong (2022, 3 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 9 – Agus Salim, Kepala Desa Rowoboni (2022, 1 Juni). Komunikasi pribadi.

DAFTAR FGD

FGD 1 – Petani laki-laki Desa Rowoboni (2022, 1 Juni). FGD tatap muka.

FGD 2 – Petani laki-laki Desa Gedong (2022, 31 Mei). FGD tatap muka.

FGD 3 – Petani perempuan Desa Gedong (2022, 31 Mei). FGD tatap muka.

FGD 4 – Petani perempuan Desa Rowoboni (2022, 1 Juni). FGD tatap muka.

FGD 5 – Perangkat desa Gedong (2022, 30 Mei). FGD tatap muka.

TENTANG PENULIS

Aditya Alta adalah Kepala Peneliti Bidang Pertanian di CIPS. Ia mempunyai latar belakang metodologi riset kualitatif dan interpretif. Ia menerima gelar Magister dari Erasmus University Rotterdam di bidang Pemerintahan dan Kebijakan Pembangunan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Aditya telah melakukan berbagai riset di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia, serta sebagai konsultan untuk proyek-proyek pembangunan.

Amalina Az Zahra memiliki pelatihan formal dalam antropologi sosial. Ia telah bekerja sebagai peneliti dan konsultan selama hampir satu dekade. Amalina memiliki pengalaman dalam meneliti dan menjadi penasihat dalam program-program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, komunitas adat/marginalisasi, gender, politik sumber daya alam, dan kerja sama internasional dalam inisiatif iklim. Sebelumnya, ia juga pernah bekerja untuk GIZ, KIT Royal Tropical Institute, Bank Dunia, dan beberapa lembaga penelitian lainnya.

Azizah Nazzala Fauzi adalah Peneliti Muda di CIPS. Ia lulus dengan gelar Master of Arts dalam Ekonomi Politik Internasional dari University of Manchester dan Bachelor of Arts dalam Hubungan Internasional dari University of Nottingham. Azizah memiliki minat penelitian pada isu-isu pembangunan pedesaan dan ekonomi politik migrasi internasional. Ia telah menyelesaikan CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) pada tahun 2021 dan kemudian bergabung dengan tim peneliti bidang pertanian di CIPS.

Unduh publikasi lainnya yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Permintaan Pangan Masa Depan di Kabupaten-Kabupaten Miskin di Indonesia



Biaya Logistik Beras dan Kedelai: Isu, Tantangan, dan Dampak Kebijakan



Biaya Hambatan Non-Tarif pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia

Silahkan kunjungi situs kami untuk melihat koleksi lengkapnya:

id.cips-indonesia.org/publication

Center for Indonesian Policy Studies
mengajak para pihak yang tertarik untuk
mendukung kami dengan bergabung
dalam Donor Circles

Jika Anda atau organisasi Anda tertarik untuk bekerja
sama dan terlibat lebih dekat dengan CIPS,
silakan hubungi:

Anthea Haryoko
Kepala Inovasi dan Pengembangan

 Anthea.haryoko@cips-indonesia.org







TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.


FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Peluang Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia